

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak ahli yang tertarik pada masalah Tionghoa yang hidup diluar Daratan Tiongkok, salah satunya adalah *J.A.C Mackie* yang pernah mengadakan suatu survei awal mengenai Masyarakat Tionghoa dan diterbitkan dalam bukunya "*The Chinese In Indonesia*" yang diterbitkan di Australia pada tahun 1976, B. P. Paulus mengatakan bahwa permasalahan Tionghoa di luar daratan Tiongkok memiliki masalah yang bervariasi dan rumit diantara satu daerah dengan daerah lainnya atau di negara satu dengan negara lainnya.¹

Keberadaan Tionghoa di Palembang telah dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya, dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya, tercatat adanya komunitas masyarakat Tionghoa yang hidup dan berkoloni di Palembang². Beberapa alasan migrasinya masyarakat Tionghoa yaitu berkembangnya agama Budha di Sriwijaya, banyaknya pusat pendidikan agama Budha yang besar diyakini sebagai daya tarik yang besar bagi penganutnya yang hendak belajar dan mendalami Agama Budha di Palembang, terutama yang datang dari daratan Tionghoa yang mayoritas penduduknya pada masa itu menganut Agama Budha. Faktor internal lain yang mendorong terjadinya migrasi masyarakat Tionghoa adalah kondisi dalam negeri Tiongkok yang tidak rentan dengan bencana alam, kemiskinan³ dan pemberontakan⁴ serta kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok masa itu⁵. Sehingga masyarakat Tionghoa hijrah mencari negeri baru untuk mereka memulai hidup yang lebih baik

Kondisi dalam negeri Indonesia yang merangsang masuknya migrasi orang Tionghoa secara besar-besaran adalah dibukanya perkebunan-perkebunan di Sumatera dan tambang

¹Paulus B.P, *Masalah Tionghoa*, Bandung: Karya Nusantara, 1976. hlm.3

² Banyaknya catatan sejarah dari Tionghoa mengenai Kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah bersumber dari Pendeta Tionghoa I-Tsing pada abad ke-7 yang menceritakan bahwa Sriwijaya dikunjungi banyak orang untuk belajar Agama Budha Vajrayana dan ditemukannya Arca Budha serta banyaknya temuan keramik Tionghoa di daerah Sumsel yang berasal dari abad XII-XIV Lihat Pierre-Yves Manguin, *Sumatera Tenggara pada Zaman ProtoSejarah dan Sriwijaya*. hlm.352,358, dan 377.

³ Pada abad ke-17, ketika terjadi modernisasi yang diikuti Industrialisasi di Eropa Barat, sejumlah imigran Tionghoa yang berimigrasi ke Asia termasuk Nusantara semakin meningkat. Demi memenuhi permintaan ekspor ke Eropa akan komoditi, imigran Tionghoa tersebut di perkerjakan di berbagai bidang seperti bidang Tambang dan Pertanian, semula alasan mereka melakukan migrasi adalah karena tingginya intensitas bencana alam di daerah asal mereka dan akibat kemiskinan yang timbul akibat perang candu. Abdullah Idi, *Bangka: Sejarah Sosial Cina-Melayu Edisi Kedua*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011. hlm. 1-2.

⁴ SQ Fatimi mengatakan bahwa telah terjadi perpindahan besar-besaran muslim Tionghoa dari Canton Tionghoa pada tahun 876 M ke daerah Asia Tenggara akibat adanya pemberontakan besar-besaran yang mengakibatkan korban sekitar 100.000-150.000 jiwa. Menurut Syed Naquib Alatas, tujuan pengungsi masyarakat Tionghoa dari Canton tersebut adalah Palembang dan Kedah. Mengacu kepada tahun 876 M yang diberikan Prof.SQ Fatimi mengenai masuknya Islam Tionghoa dari Canton tersebut, pada masa itu di Palembang masih berkuasa Kerajaan Sriwijaya, dalam Prasasti Nalanda yang ditemukan di India bertahun 860 M, yang berkuasa di Sriwijaya masa itu adalah Raja Balaputra Dewa

⁵ Keadaan dalam negeri Tiongkok masa itu juga turut menyumbang sebagai faktor pendorong hijrahnya masyarakat Tionghoa ke negara lain, masa itu didalam negeri Tiongkok sendiri terjadi perubahan kebijaksanaan politik yaitu pencabutan larangan tinggal diluar daratan Tiongkok serta banyaknya pemberontakan-pemberontakan didalam negeri yang mendorong masyarakat mereka melakukan Migrasi. Mazali, Amri. *Pemetaan Sosial Politik Kelompok Etnik Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: LIPI, 2011. edisi XXXVII No.2

timah di Bangka⁶. Selain itu, mulai longgarnya peraturan Pemerintah Belanda terhadap masuk dan menetapnya orang Tionghoa di daerah koloni setelah tahun 1900-an sehingga mereka lebih leluasa masuk ke Nusantara dan berdiam dengan berpencar-pencar dan hal tersebut menjadikan kehidupan mereka lebih heterogen karena para pedagang Tionghoa itu bersebaran keseluruh Nusantara berasimilasi dengan etnis pribumi⁷

Sejarah masyarakat Tionghoa di Palembang yang demikian panjang, telah dimulai pada masa Sriwijaya hingga sempat mendominasi Palembang pada abad 14 M awal, maka tentunya telah banyak terjadi percampuran-percampuran asimilasi antara masyarakat asli Melayu di Palembang dengan Masyarakat Tionghoa tersebut yang terlihat dalam kemiripan budaya yang ada di Palembang dengan Tionghoa⁸.

Banyak faktor yang mendukung berhasilnya pembauran Tionghoa dan Melayu Palembang masa lalu, sifat terbukanya Agama Islam yang merupakan keyakinan mayoritas masyarakat Palembang dalam melihat dan menerima perbedaan-perbedaan ras, dimana dalam Islam mengajarkan agar menciptakan kerukunan dengan sesama walau adanya perbedaan etnis ataupun agama (Islam dan Non Islam)⁹

⁶ Buruh Tionghoa ke daerah-daerah perkebunan di Sumatera Utara dan Kepulauan Timah (Pulau Bangka) sekitar tahun 1860 hingga 1890-an. Pada masa pemerintahan KeSultanan Palembang, keperluan imigrasi etnis Tionghoa masuk ke Palembang dan Bangka sebagian besar disponsori oleh keSultanan, hal ini terkait karena kurangnya tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan timah di wilayah KeSultanan Palembang, Sultan mengimpor tenaga kerja Tionghoa tersebut dari Malaka dan Batavia. Sultan mengimpor tenaga buruh dari Tionghoa Daratan, hal tersebut menjadi otoritas penuh Sultan Palembang sedangkan saat itu VOC hanya sebagai rekan dagang. Lihat Abdullah Idi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷ Paulus, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁸ Pembauran antara Tionghoa, Melayu dan Islam juga terlihat dalam seni arsitektur rumah ibadah di Palembang, terlihat dari arsitek masjid Agung Palembang dimana tiang, pintu dan jendela Masjid dimana bentuk dan ukirannya yang penuh dengan ukiran yang nuansa negeri Tiongkok, Jumlah Etnis Tionghoa di Indonesia memang secara jumlah adalah relatif kecil dan minoritas dibanding etnis lain yang ada, menurut menurut Wakil Ketua Bidang Kesra DPP PITI, Budijono bahwa dari sekitar 238 Juta Jiwa penduduk Indonesia, 15 persennya adalah keturunan etnis Tionghoa, dan dari 15 persen itu, sekitar 5 persennya adalah muslim. Namun dala sektor ekonomi diduga sebanyak 70-80 persen perekonomian Indonesia dikuasai etnis Tionghoa. Budijono, "Etnis Tionghoa Indonesia" *Harian Republika*, 14 Juni 2013.

⁹ Dalam tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah Muhammad, secara tersirat dan tersurat adanya tuntunan dalam menerima dan bersikap terhadap perbedaan, terlihat dalam Surat Surat Al-Qur'an Surat Al Hujarat Ayat 13. "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". Dalam Hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Abbas, Rasulallah bersabda "Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasululllah saw. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?' maka beliau bersabda: "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)"

Hadis ini diriwayatkan Imam Buchari dalam Kitab Iman dalam Bab Agama Itu Mudah, Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi adalah *samâhah* atau *tasâmuh*. Para pakar leksikograf Arab mengartikan sebagai berlaku lembut dan mempermudah kata ini pada dasarnya berarti al-jûd (kemuliaan). atau sa'at al-sadr (lapang dada) dan tasâhul (ramah, suka memaafkan). Makna ini berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka (welcome) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Dengan demikian, berbeda dengan kata tolerance yang mengandung nuansa

Dukungan lain dari pimpinan masyarakat Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badarudin I sendiri menjadi contoh bagi masyarakat Melayu Palembang melakukan pembauran Tionghoa dan Melayu Palembang salah satunya dengan menikahi seorang Putri Tionghoa dan mengangkat pejabat keSultanan dari etnis Tionghoa¹⁰,

Sejarah membuktikan bahwa asimilasi etnis Tionghoa pada masa lalu cukup berhasil namun kemudian mulai terjadi perubahan ketika Kolonial Belanda masuk ke Nusantara dengan Politik Pecah Belah (*divide et impera*)¹¹. Belanda melakukan perubahan perubahan sosio-budaya antara orang Tiongkok dan pribumi dengan mengutamakan masyarakat Tionghoa dirasa menyakitkan bagi pribumi terutama dibidang bidang hukum, dengan mendudukan Etnis Tiongkok sebagai “Orang Timur Asing” dengan status yang lebih tinggi dari orang-orang Pribumi.¹²

Bersamaan pada masa itu mulai bangkitnya Nasionalisme Indonesia dan bangkitnya Nasionalisme Tiongkok di Daratan, sehingga ketika kedua nasionalisme itu bertemu dalam satu tempat (Indonesia) membuat makin lebarnya jurang kebencian pribumi dengan Tionghoa yang ditunjang dengan adanya perbedaan ras, budaya dan sosial antara Tiongkok dan

keterpaksaan, maka kata tasâmuh memiliki keutamaan, karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri (al-jûd wa al-karam) dan keikhlasan Akan tetapi, makna memudahkan dan memberi keluasan di sini bukan mutlak sebagaimana dipahami secara bebas, melainkan tetap bersandar pada al Quran dan Hadis. Lihat Agung Setiawan, “Pendidikan Toleransi dalam Hadis Nabi SAW”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.XII, No. 2, 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Selain itu, pada masa itu juga telah ada Tionghoa muslim yang menjadi Ulama dan mengangkat pejabat Negara dari kalangan Tionghoa, seperti. Baba Yu-Chien (1670-1750) sebagai Bendahara KeSultanan Palembang dengan pangkat Teku Susuhunan Palembang dan berjudul Pangeran Saudagar Kucing. Saudagar Kucing ini dipercaya oleh Sultan Palembang merancang bangunan Masjid Agung dan Benteng Kuto Besak, buyut Sudagar Kucing adalah Kapiten Belo yang dipercaya Sultan sebagai penguasa Tanah Bangka hingga menuju pelabuhan di Palembang, Kapiten Belo ini merupakan anak dari Pangeran Negeri Tiongkok yang bergelar Tuo Pe’Kong. Baba Azim, “*Saudagar Kucing*” Sumeks, 22 Mei 1999.

¹¹ Belanda membuat tiga tingkatan kelas masyarakat, yaitu kelas teratas adalah masyarakat Eropa, kelas nomor dua adalah non pribumi (Tionghoa dan Negeri Timur) dan kelas ketiga adalah masyarakat pribumi. Hal ini menurut Susetya dalam Afthonul Afif, menjadikan terpisahnya masyarakat Tionghoa dengan Pribumi, kebijaksanaan tersebut di tindak lanjuti dengan peraturan memasukan masyarakat Non Primbumi kedalam golongan Masyarakat Pribumi bila terbukti mereka menjalin hubungan dan mempraktikan kebudayaan, tradisi maupun agama pribumi, menurut The Siaw Giap dalam Afthonul Afif, maka Orang Tionghoa saat itu yang memeluk Islam, golongannya akan turunn menjadi golongan pribumi atau menjadi kelas terendah, dan konsekuensi lanjutnya adalah, keluarga mereka dari kalangan Tionghoa non muslim tidak akan mengakui hubungan kekeluargaan lagi dengan Tionghoa yang memeluk Islam. Lihat Afthanul Afif. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*. Depok: Penerbit Kepik, 2012. hlm. 8.

¹² Pada mulanya, Belanda mengambil sikap bermusuhan dengan etnis Tionghoa yang berada di Nusantara karena Belanda mengangga etnis Tionghoa sebagai saingan dalam usaha perekonomian mereka, namun kemudian Belanda melihat bahwa hubungan yang erat antara etnis Tionghoa dengan etnis Pribumi di Nusantara dapat membahayakan kedudukan mereka di Nusantara, maka Belanda mengubah politiknya dengan merangkul etnis Tionghoa sebagai mitra bisnis Belanda di Nusantara. Belanda menerapkan kebijakan politik keterpisahan identitas, menurut pasal 163 *Indiche staarteregeling* yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda, masyarakat Hindia Belanda di ebdakan menjadi Eropa dan Timur Asing(Tionghoa, Arab, India dll namun dalam prakteknya hanya Tionghoa yang di istimewa) di satu pihak dan pihak lain adalah Bumiputra/Pribumi. Lihat Abdullah Idi, *Op. Cit.*, hlm.78-90.

Pribumi.¹³ Pada masa sekarang ini, walaupun Kolonial Belanda sudah lama berakhir tetapi dampak dari kebijakan yang mereka ambil masih terasa hingga sekarang dengan masih banyaknya masyarakat Tionghoa yang stereotip negatif terhadap Melayu dan Islam¹⁴ yang di kaitkan dengan kemalasan, tidak toleran, kemiskinan dan keterbelakangan¹⁵.

Pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami guncangan politik dan krisis pada tahun 1965, saat itu Soeharto berhasil menggagalkan percobaan kudeta Gerakan 30 September (G30S) yang dilakukan PKI yang kemudian merembet kepada kerusuhan besar-besaran Anti-Tionghoa di kota-kota besar di Indonesia, hal tersebut karena Tionghoa dianggap mendukung gerakan kudeta yang dilakukan PKI.¹⁶, puncaknya Indonesia mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik secara resmi dengan pemerintahan Tiongkok pada tanggal 9 Oktober 1967, dan membaik kembali dengan kembali dibukanya Kedutaan Tiongkok di Jakarta pada tahun 1990¹⁷.

Pada Orde Baru, walau etnis Tionghoa dikekang secara Politik, tetapi dibidang ekonomi, etnis Tionghoa memiliki banyak *previllage*. Hubungan antara Penguasa Orde Baru dan Pengusaha Tionghoa serta dukungan Militer yang terjalin masa itu tentunya menimbulkan kecemburuan dari pengusaha-pengusaha pribumi, dimana investasi modal asing yang masuk ke Indonesia lebih memberikan manfaat ke pengusaha Tionghoa dari pada pengusaha pribumi dengan alasan pengusaha Tionghoa lebih siap dalam pengalaman, modal dan keterampilan teknis¹⁸. Simbiosis Militer-Pengusaha-Penguasa masa Orde Baru membuat peluang besar terciptanya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Akibat KKN yang dilakukan para pejabat Orde Baru dengan para konglomerat yang merupakan cukong-cukong ber-etnis Tionghoa dengan memberikan hak-hak istimewa dalam usaha ekonominya secara terus menerus menjadikan kemarahan dikalangan pribumi kala itu, dan praktek KKN tersebut membuat terpuruknya perekonomian Indonesia hingga puncaknya kebencian masyarakat terhadap Pemerintahan Suharto dan etnis Tionghoa dengan meletusnya kerusuhan pada tahun 1998, seakan menunjukkan kebencian, penolakan bahkan seakan

¹³ Pada permulaan abad 20-an ini, kita kenal masa kebangkitan Nasionalisme Indonesia dan Nasionalisme Tiongkok dan kecendrungan untuk menjadikan faktor rasial sebagai salah satu unsur utama dalam nasionalisme dan memperkuar rasa perbedaaan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya seperti Bangsa Belanda dan Tiongkok. Lihat Paulus BP. *Op. Cit.* hlm. 65.

¹⁴ Banyaknya amaliyah dalam Islam yang bertentangan dengan budaya Tiongkok seperti makan daging babi, minum arak dan pemujaan leluhur, apalagi pemerintah Hindia Belanda menanamkan stereotyp bahwa Islam adalah kelompok sosial-ekonomi yang lebih rendah. Untuk menggambarkan perspektif masyarakat Tionghoa kepada Islam, Abdul Karim Oey mengutip perkataan ayahnya ketika dia hijrah masuk Islam "Ananda adalah orang yang mampu, keturunan baik-baik, mengapa mau masuk suku Melayu, pakaian Jorok dan serba buruk itu?" Lihat Leo Suryadinata, *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia*, Jakarta:Komunitas Bambu,2010. hlm.142.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ RRC melakukan provokasi melalui radio Peking terhadap revolusi Indonesia dan sikap RRC yang mendukung gerakan 30 September yang ditunjukan dengan mengkritik dan menyerang rezim militer Soeharto-Nasution. Lihat Dewi Y R Kusuma dan Artono, *Asimilasi versus Integrasi:Reaksi Kebijakan Ganti Nama WNI Tionghoa 1959-1968*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.hlm. 14.

¹⁷. Wayne Bert. *Chinese Policy Toward Burma and Indonesia: A post mao perspective*, Asian Survey,1985.hlm 963-980.

¹⁸Schwarszdalam Aime Dawiss, *Loc. Cit.*

menunjukkan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian tatanan yang tidak di inginkan di Indonesia¹⁹.

Namun hikmah dari peristiwa 1998 tersebut, membuat bangsa ini mulai sadar akan pentingnya persamaan hak dalam perbedaan yang dimiliki, hal tersebut, pada tahun 1998 adalah akhir dari masa pemerintahan Orde Baru dan pada awal awal masa reformasi ini mulai banyak perbaikan-perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang selama ini mengekang dan mengatur Etnis Tionghoa di Indonesia, dimulai masa Presiden Abdurrahmah Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.²⁰

Walau demikian, orang-orang Tionghoa melihat bahwa keberadaan mereka di Indonesia sebetulnya dalam posisi “dalam keadaan yang bisa sewaktu-waktu bisa berubah drastis”. Hal ini tergambar dalam teori *Erick Erickson* yang mengatakan :

Identitas sebagai keserasian peran sosial yang pada prinsipnya dapat berubah dan selalu berubah-ubah

identitas Tionghoa didalam masyarakat Indonesia yang selama ini terlihat sudah mantap ternyata karena sesuatu hal bisa berubah dengan cepat.

Sehingga mereka berfikir untuk tidak sepenuhnya menyerahkan keberadaan mereka pada pemerintah²¹. Namun usaha mereka untuk melakukan upaya tersebut, pelabelan negatif masih melekat disebagian masyarakat asli dan masih adanya sebagian Tionghoa yang cenderung menutup diri dan bersikap eksklusif²², apakah ini akibat adanya Memori kolektif²³ disebagian masyarakat asli Melayu Palembang?

¹⁹Aguilar dalam Aime Dawiss menuliskan dalam tulisannya “*Citizenship, Inheritance and the Indigenizing of Orang Tionghoa in Indonesia*” berpendapat bahwa Orang Tionghoa akan selamanya di cap sebagai limigran generasi pertama dengan latar belakang masa lalu yang penuh siksaan, rawan sengketa dan tidak berubah, orang Tionghoa akan selalu di pandang sebagai orang asing di Indonesia karena mereka berasal dari negeri yang jelas Negeri Tionghoa. Lihat/*ibid.* hlm. 35.

²⁰. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres No.6 Thn 2000 yg mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan melakukan acara budaya dan ritual Tionghoa secara terbuka, tahun 2002, Presiden Megawati mengeluarkan Keppres yang meresmikan Tahun Baru Imlek menjadi libur nasional, dan tahun 2006, masa Presiden SBY, mengeluarkan UU kewarganegaraan yang menyatakan bahwa warga negara yang lahir di Indonesia adalah warga negara asli.

²¹. Kerusuhan Mei 1998 yang telah menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Orde Baru juga telah menjadi sebuah pertanda bagi Etnis Tionghoa bahwa mereka tidak sepenuhnya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, walau pemerintah telah melakukan perbaikan-perbaikan melalui banyaknya peraturan yang menyangkut persamaan dan menghapus diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di keluarkan, namun kejadian tersebut membuat etnis Tionghoa juga lebih memikirkan peran etnik dan politik apa yang bisa mereka ambil dan lakukan dalam rangka memperjuangkan keberadaan mereka di Indonesia. Lihat Darwin Darmawan, *Identitas Hibrid Orang Cina*, Yogyakarta:Gading Publishing,2014. hlm.69.

²² Afif, *Ibid.*, hlm. 133. Selain itu,Sebuah penelitian dilakukan oleh Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) dengan tejuk penelitin Sikap WNI keturunan Cina terhadap pembauran, dengan mengambil sampel di kota Jakarta, Semarang, Medan dan Pontianak, hasilnya menyimpulkan bahwa WNI keturunan Cina memiliki sifat menolak terhadap pembauran dengan pribumi, salah satu penelitinnya Prof Sartono Mukadis menyatakan bahwa generasi penerus mereka lebih eksklusif, misalnya dengan melanjutkan sekolah-sekolah di Luar Negeri atau mendirikan sekolah-sekolah yang khusus untuk warga keturunan, walaupun ini penelitian ini sudah lama , namu menurut Mukadis, hasil penelitian ini masi relevan. Lihat Zein A. Baqir,*Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Jakarta:Pretasi Insan Indonesia,2000. hlm.6.

Apabila Peneliti lihat terkait masalah Pilkada DKI Jakarta dimana salah satu pasangan calonnya dari etnis Tionghoa yang didakwa melakukan penistaan agama terhadap Agama Islam sehingga menimbulkan penolakan-penolakan yang keras terhadap calon tersebut dari masyarakat Melayu, yang meluas hingga ke Palembang

Dalam sejarah etnis Tionghoa di Palembang yang sudah dimulai sedemikian panjang dari masa kejayaan Sriwijaya hingga masa kemerdekaan sampai tahun 1998 dimana identitas yang dianggap telah eksis dan stabil bisa hancur dalam sekejap, maka penulis merasa perlu melihat bagaimana etnis Tionghoa membangun Identitas sosial mereka pasca reformasi dan bagaimana resistansi masyarakat Palembang.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat permasalahan resistansi Tionghoa di masyarakat Melayu Palembang, berangkat dari fenomena masih adanya resistansi masyarakat Melayu Palembang terhadap Etnis Tionghoa secara umum, maka masalah diidentifikasi dari :

- 1) Sosial Sosial Budaya, masyarakat Tionghoa terkenal dengan sifat eksklusifnya dalam pergaulan,
- 2) Dibidang Agama, Tionghoa memiliki keyakinan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Melayu Palembang.
- 3) Politik, dibidang ini, Tionghoa dicurigai ke Nasionalisme-annya, dalam sejarah tercatat mereka cenderung memihak kepada kolonial dan negara asalnya yaitu Tiongkok.
- 4) Dibidang ekonomi, etnis Tionghoa memiliki dukungan pemerintah yang kuat sehingga menimbulkan praktek monopoli.

1. Batasan Masalah

Permasalahan dalam tulisan ini dibatasi pada dinamika terbentuknya Identitas Tionghoa dalam masyarakat Melayu Palembang dan resistansi masyarakat terhadap etnis Tionghoa di Palembang dengan batasan: Periode masa berakhirnya pemerintahan Orde Baru atau awal Reformasi (1998) hingga sekarang (2017). Lokus penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dan fokus penelitian ini berorientasi pada faktor faktor timbulnya resistensi terhadap orang Tionghoa oleh masyarakat Melayu di Palembang.

2. Rumusan Masalah

²³Menurut *Halbwachs*, memori adalah sebuah penampakan sosial yang isi dan kegunaanya dijelaskan melalui interaksi dengan orang lain dalam bentuk bahasa, tindakan, [komunikasi](#) dan dengan ungkapan emosi-emosi pada konfigurasi keberadaan sosial kita. Ingatan terbentuk melalui dialog dalam kelompok sosial, seperti halnya sebuah ingatan yang terbesar atau bagian kenangan yang terkuat akan menjadi ingatan yang resmi di dalam kelompok tersebut. Halbwachs melengkapi frasa "kita adalah yang kita ingat" menjadi "kita adalah apa yang kita miliki" dengan sangat yakin mengembangkan arti sempit dari memori tersebut dengan menunjukkan sisi-sisi sosialnya Ia menyatakan bahwa memori adalah apa yang terbentuk secara bersama melalui perhatian dan kecemasan dalam sebuah kelompok masyarakat, tersalur melalui interaksi kelompok, dan dibatasi dalam ruang disosialisasikan. Lihat Michael J. Thate, *Remembrance of Things Past: Albert Schweitzer, The Anxiety of Influence, and The Unity of Jesus of Markan Memory*, Tubingen: Mohr Siebeck, 2013. hlm. 190.

Dari Masalah penelitian tersebut, maka dibagi dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

- a) Bagaimana kedudukan etnis Tionghoa dalam struktur sosial masyarakat Melayu Palembang?
- b) Bagaimana resistensi masyarakat Melayu Palembang terhadap etnis Tionghoa terjadi dalam masyarakat Palembang?
- c) Bagaimana akomodasi kultural yang berlangsung antara Melayu dan Tionghoa?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini apabila dirinci secara khusus adalah sebagai berikut:

- Mengetahui kedudukan etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial Masyarakat Melayu di Palembang
- Mengetahui faktor terjadinya resistensi dan bentuk atau pola-pola resistensi masyarakat Melayu Terhadap etnis Tionghoa
- Mengetahui akomodasi kultural yang terjadi didalam masyarakat Palembang antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pengamat dan praktisi sosial didalam masyarakat mengenai dinamika masyarakat Tionghoa, karena pembahasan mengenai Tionghoa di Palembang masih sangat jarang dan belum menjadi perhatian bagi akademisi, padahal dengan adanya kajian-kajian akademik yang komprehensif mengenai Tionghoa akan dapat memberikan informasi yang tepat tentang kedudukan orang Tionghoa di Palembang serta pemahaman dan cara pandang masyarakat Melayu di Palembang terhadap Tionghoa.

Informasi mengenai Tionghoa di Palembang sangat penting untuk diketahui masyarakat luas, agar mereka mendapat gambaran yang jelas bagaimana terjadinya resistansi terhadap mereka bisa terbentuk dan faktor-faktor pendukungnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi penambah data mengenai dinamika Tionghoa di Palembang, bagaimana dinamika mereka selama mencari identitas sebagai warga negara Indonesia, dengan melihat dinamika mereka sebelum masa reformasi dan setelah masa reformasi hingga tahun 2017 sekarang ini. Sehingga diharapkan dapat dipahami secara komprehensif dari berbagai fenomena yang terjadi khususnya resistansi masyarakat Palembang, sehingga bisa menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya terutama bagi peneliti yang berminat memperhatikan dan mempelajari fenomena Tionghoa di Indonesia atau di Palembang.

D. Defenisi Operasional

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap resistensi masyarakat Melayu Palembang terhadap Orang Tionghoa, maka perlu dijelaskan secara rinci mengenai teori yang digunakan dan konseptual istilah yang digunakan.

1. Resistansi.

Secara etimologi, kata resistansi merupakan serapan berasal dari bahasa asing, yakni dari kata *Resistance*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resistansi (baku: resistansi) berarti ketahanan. Dengan kata lain, makna kata ini adalah sebuah sikap bertahann, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Kaitan dalam penulisan ini adalah, sikap menentang atau menolak masyarakat Palembang terhadap keberadaan dan aktivitas etnis Tionghoa di Palembang.

2. Tionghoa

Tionghoa adalah etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia dan berdiam hidup di negeri Indonesia, mereka datang ke Indonesia tidak dengan waktu bersamaan tergantung situasi politik daerah asal mereka maupun daerah tujuan mereka (Indonesia) pada awal-awal hubungan Tionghoa dengan Nusantara/Sumatera Selatan saat itu melalui jalur perdagangan beriring dengan terbukanya jalur sutra laut (140-88 SM) sehingga memudahkan perjalanan dagang dari Tiongkok ke India melalui Semenanjung Malaya²⁴. Dalam perkembangan selanjutnya, imigrasi Tionghoa ke Palembang Darussalam saat itu karena dibukanya tambang-tambang timah di kepulauan Bangka. Untuk pengisi kekurangan tenaga kerja, Sultan membawa masuk kuli-kuli tersebut. Selanjutnya para imigran tersebut berasimilasi dengan penduduk pribumi di Palembang dalam berbagai aspek termasuk melakukan pernikahan dan memeluk agama Islam untuk memperkuat keberadaannya.

Asal penduduk Tionghoa di Palembang secara umum sama dengan penduduk Tionghoa di daerah Indonesia lainnya, yaitu antara lain berasal dari provinsi Kwantung, Fukkien dan Kanton. Dari Kwantung adalah suku bangsa Teo chiu dan Hakka yang tinggal di daerah pantai selatan Tiongkok dan daerah pedalaman Swatow bagian timur, sedangkan yang berasal dari Fukkien adalah suku bangsa Hokkien dan dari Provinsi Kanton adalah suku bangsa Kwong Fu.²⁵

3. Masyarakat Melayu Palembang

Masyarakat Melayu Palembang adalah suatu suku yang Melayu yang dikenal dengan nama Suku Palembang, Suku ini tinggal di Kota Palembang khususnya di daerah pesisiran dan daerah-daerah disekitar Kota Palembang seperti Indralaya, Pamulutan dan Meranjat. Masyarakat Melayu Palembang adalah masyarakat yang multi etnis, kurang lebih 20 etnis yang hidup dan tinggal di Palembang baik di ibu kota

²⁴. Dalam catatan Hau Han Shu, diceritakan adanya negeri Ye Dio (Ye Dia adalah sebutan Javadwipa/Nusantara dalam dialek Tionghoa kala itu) mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 131 Masehi. Selain itu ditemukannya batu berukir di Pasemah, Sumatera Selatan, dengan gaya ukiran mirip dengan ukiran yang terdapat di makam Panglima Besar Dinasti Han Huo QiBing abad 140–117SM. Lihat Liang Liji, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis*, Jakarta:PT.Kompas Media Nusantara, 2012.hlm. 28-29.

²⁵Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa ... Op. Cit.*

amupun didaerah pinggirannya bahkan ada yang berdiam di pedalaman, ini disebut daerah Uluan dan Iliran. Penduduk Kota Palembang selain penduduk asli, ada juga yang berasal dari China²⁶, Malaka dan pesisir Sumatera Timur dan pada Abad ke 16 banyaknya migrasi masyarakat Jawa yang masuk ke Palembang dan berkuasa di sana²⁷, dengan demikian masyarakat pedalaman yang merupakan pribumi asli (Uluan) menyebut Masyarakat Palembang sebagai Orang Jawa²⁸. Masyarakat Melayu Palembang dalam penelitian disini adalah masyarakat Melayu asli dan tinggal hidup di Kota Palembang

Berdasarkan defenisi diatas, dalam penelitian ini mengangkat permasalahan resistensi Tionghoa dalam Masyarakat Melayu Palembang adalah dinamika pribadi-pribadi dalam kelompok Tionghoa di Palembang memahami dan mengetahui dirinya (*self*) dan segala perbuatannya yang berkaitan dengan dirinya maupun perbuatannya tersebut berkaitan dengan orang lain yang dipahami sebagai ciri yang khas dan menjadi pembeda dalam interaksi mereka dengan masyarakat Melayu Palembang.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan disertasi ini, untuk melihat bentuk-bentuk resistensi yang ada dalam masyarakat Palembang, *Michael Hardt* dan *A. Negri* menulis dalam *Multitude War and Democracy in The Age Of Impire*²⁹ bahwa resistensi memiliki bentuk yang berbeda-beda dalam sepanjang sejarah dan secara umum, adanya resistensi terjadi karena adanya perubahan didalam masyarakat. Resistensi menurut *James Scott*, definisi resistensi adalah semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakan atau menolak tuntutan-tuntutan (misal mengenai harga sewa, pajak dll) yang dikenakan kepada kelas tersebut oleh kelas masyarakat yang lebih tinggi (misal adalah tuan tanah, pemilik bangunan atau pemberi bantuan) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sendiri (seperti meminta pekerjaan atau penghargaan) terhadap kelas yang lebih tinggi ini. Menurut *Scott*, resistensi bentuknya sangat beragam dan dapat dilihat dari ketidak patuhan ,penolakan dengan berbagai upaya, *Scott* merumuskan ada dua bentuk resistensi masyarakat yaitu *public transcript* dimana resistensi ini secara langsung dan terbuka dengan melakukan aksi seperti melakukan aksi penolakan baik melalui demo maupun tulisan, resistensi kedua adalah *hidden transcript* dimana resistensi penolakan dilakukan tersembunyi dan dilakukan dibelakang lawan seperti melakukan kepura-puraan³⁰.

²⁶Sebagaimana disampaikan di latar belakang mengenai gelombang kedatangan Etnis Tionghoa yang besar ke Palembang masa Sriwijaya, KeSultanan Palembang dan Kolonial.

²⁷Diduga akibat adanya konflik politik di Pajang antara pegikut Adipati Jipang dan Senapati Mataram pasca meninggalnya Adiwijaya, mengakibatkan pengikut dari adipati Jipang melarikan diri, salah satunya Ki Gede Ing Suro bersama 80 kepala keluarganya menuju Palembang dan kemudian mendirikan kekuasaan baru di Palembang.

²⁸Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Palebuhan Palembang 1824-1864*, Yogyakarta:Penerbit Ombak,2013. hlm.34.

²⁹Michael Hardt dan A.Negri, *Multitude War and Democracy in the Age of Empire*, New York City: Penguin Group. 2004, hlm.68

³⁰Scott,J.C, *Senjatanya Orang Orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani*, Jakarta;Yayasan Obor, 2000, hlm 47

Analisis *James C. Scott* melalui beberapa tulisannya, menunjukkan fakta bahwa komunitas margin melakukan praktek-praktek perlawanan dengan caranya sendiri. Scott menggambarkan praktek perlawanan kelompok subordinat barat oposisi editor surat kabaryang bekerja dibawah sensoryang ketat dari atasannya. Posisinyayang lemah membuat dia harus berlakusedemikian rupa sehingga ia tetap bisa menyampaikan pesanyang dikehendakinyatanpaterlihatmenantang aturan yang berlaku. Ini membutuhkan satusemangateksperimental dan kapasitas untuk mengujidan mengeksploitasi semuacelah, ambiguitas, ketenangan, dan perilaku yang ada. Iniberartiharus mempertimbangkanberbagaiukuran yangdigunakan oleh pemegang otoritas tentang hal yangdibolehkan danyangdilarang³¹

Peneliti mencoba menggali bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat Melayu Palembang terhadap etnis Tionghoa yang tumbuh di masyarakat, bentuk-bentuk resistensi ini tentu merupakan ekspresi ketidak puasan masyarakat Melayu Palembang yang sering kali didahului dengan bentuk resistensi tertutup namun akhirnya menjadi resistensi terbuka dan menjadi konflik

Selain itu, untuk melihat bentuk komunikasi yang dibangun kedua etnis yang menghasilkan symbol symbol yang dimaknai sesuai kualitas hubungan timbal balik tersebut, peneliti menggunakan teori Interaksionisme Simbolik yang diperkenalkan oleh *Manfred H. Kuhn* dari *State University of Iowa* yang berpendapat bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi sosial³²,

Interaksionisme Simbolik memiliki dua mazhab besar yaitu mazhab Chicago yang cenderung kearah pemaknaan ideographik dan mencari pemaknaan yang dalam karena meyakini bahwa tingkah laku adalah hasil dari dorongan batin bukan dari stimuli luar dan mazhab Iowa yang meyakini bahwa tingkah laku di pengaruhi oleh interaksi sosial mereka.³³

Interaksionisme Simbolik didasarkan pada ide-ide individu dan interaksinya dengan masyarakat, esensi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri-ciri dari manusia yaitu komunikasi berupa pertukaran simbol-simbol yang memiliki makna. Perspektif ini menyarankan bahwa manusia harus dapat mengontrol dan memajemen prikalu mereka dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat dimana mereka berinteraksi. Definisi mereka yang diberikan kepada orang lain baik berupa situasi, objek maupun diri mereka sendiri yang menentukan prilaku manusia.³⁴

Interaksi sosial dalam kehidupan manusia pada dasarnya menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik mempelajari bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol tersebut yang mempresentasikan maksud manusia dan menjadi alat komunikasi. Menjadi penting adalah pengaruh/efek yang ditimbulkan dari penggunaan dan penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap pihak yang ikut dalam interaksi sosial.³⁵

³¹ James C Scott dalam Murdianto, *Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus di MAdura dan Tionghoa di Indonesia)* Qalamuna Jurnal, IAIN Sunan Giri Ponorogo, Vol.10 No.2 Tahun 2018. hal. 8

³² Noeng Muhadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991. hlm.136-137.

³³ *Ibid.*

³⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002. hlm.68-70.

³⁵ Artur Asa Berger, *Tanda-tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*. Terj. .M.Dwi Mariyanto dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004. hlm.14.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Interaksionisme Simbolik*³⁶ untuk memahami bagaimana suatu realitas sosial resistansi Tionghoa terbentuk, tidak semata merupakan konsekuensi dari adanya hubungan-hubungan sosial yang luas dan melembaga tetapi juga sebagai agen dengan kapasitas untuk menciptakan masyarakat baru sebagai konsekuensi dan berlangsungnya interaksi sosial dengan individu-individu yang lain.

Untuk mengetahui proses pembentukan resistansi Tionghoa di Palembang dan dinamikanya, maka peneliti mencoba masuk kedalam kehidupan kelompok sosial mereka secara alami demi membangun empati dan sensitivitas peneliti dalam memahami segala sesuatu yang berlaku di dalamnya. Untuk itu peneliti tentunya meminta izin dan kesediaan para responden yang terlibat demi lancarnya penelitian yang dilakukan dan demi adanya keterbukaan dari komunitas mereka sehingga peneliti mendapat data yang sebenarnya dari keadaan mereka.

Peneliti akan fokus kepada cara-cara para individu dalam memandang diri mereka sendiri dalam kelompoknya, atau cara mereka memahami orang melihat mereka atau cara mereka merespon atas peristiwa-pristiwa yang terjadi, cara mereka berinteraksi dengan sesama mereka dan berinteraksi dengan lingkungan diluar mereka, selain itu demi kemurnian penelitian, peneliti harus *epoche* atau mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka selama dalam penelitian fenomena ini.³⁷

F. Tinjauan Pustaka

Penelusuran peneliti terhadap karya-karya sebelumnya yang terkait dengan bahasan penelitian, ditemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan Tionghoa di Indonesia, yaitu:

1. *Leo Suryadinata* dalam penelitian disertasinya yang dijadikan buku dengan judul *Dilema Minoritas Tionghoa*, Suryadinata membahas keberadaan minoritas Tionghoa di Indonesia atas semua aspek, baik aspek politik, budaya, sosial dan ekonomi, menurut Suryadinata, masalah minoritas China di Indonesia, bukanlah sekedar masalah minoritas semata tetapi masalah nasional dan internasional.
2. Irfadli membahas mengenai Tionghoa Muslim di Palembang pada Tahun 2012 dalam Skripsinya yang berjudul *Asimilasi Etnis Tionghoa Muslim di Palembang*, Irfadhli menggunakan pendekatan Sosiologi dalam penulisan skripsinya dengan fokus kepada Tionghoa Muslim yang berasimilasi dengan pribumi Melayu di Palembang, Irfadhli melihat bahwa Asimilasi Tionghoa Muslim dengan Melayu Palembang terjadi dalam tingkatan-tingkatan asimilasi yaitu: Kultural, Struktural, Identifikasi dan Perkawinan, dengan faktor pendukung asimilasi adalah persamaan klas sosial ekonomi antara Melayu dan Tionghoa, sikap Melayu Palembang yang terbuka, penyebaran penduduk dan system pendidikan. Adapun yang menghambat adalah sifat eksklusif dari

³⁶Ahmad Zainal Arifin dalam artikelnya mendukung penggunaan perspektif interaksional, dia melihat bahwa penggunaan perspektif ini jarang digunakan seperti perspektif lainnya. Dalam penggunaannya perspektif melihat komunikasi komunitas Tionghoa tersebut bukan hanya secara verbal tetapi non-verbal berupa semua symbol lainnya. Lihat Ahmad Zainal Arifin, *Mengenal dan Mengaplikasikan Perspektif Interaksionisme Simbolik*, hlm. 2.

³⁷*Ibid.*, hlm. 68.

etnis Tionghoa yang menutup diri dan mengambil jarak dengan masyarakat Melayu di Palembang

3. Kemas Ari dalam penelitiannya yang berjudul *Masyarakat Tionghoa Palembang-Tinjauan Sejarah Sosial 1823-1945*, dalam tulisannya, Kemas Ari mencoba menggunakan pendekatan multidimensional dalam menggambarkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Tionghoa di Palembang, dimulai masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga masa Kemerdekaan Indonesia. Dalam penelitian ini Kemas Ari melihat pola kehidupan Masyarakat Tionghoa dalam beberapa bidang kehidupannya seperti Budaya, Perekonomian/mata pencaharian, kepemimpinan, sekolah, Bahasa dan religious.
4. Afthonul Afif, dengan judul *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, tulisan ini merupakan tesis Afif saat mengambil Magister di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, dan kemudian tulisan ini dituangkan kedalam bentuk buku. Dalam buku ini Afif menceritakan sejarah pencarian jati diri Tionghoa di Indonesia dengan menjadikan Islam sebagai Identitas dengan lokasi penelitian di Yogyakarta..
5. *Masalah Cina : Hasil penelitian Ilmiah di beberapa Negara-negara Asia dan Australia* merupakan hasil penelitian ilmiah di beberapa negara yang di sajikan oleh B.P Paulus.SH, Paulus, Paulus melihat bahwa permasalahan Tionghoa bukan hanya di alami oleh Indonesia saja, tetapi semua negara dimana masyarakat Tionghoanya berada khususnya di Negara Asia dan Australia. Paulus melihat bahwa masalah Tionghoa di seberang lautan (diluar tanah Tiongkok) sangat rumit dan bervariasi permasalahannya, namun dalam kenyataannya, Politik kebijaksanaan suatu negara terhadap penduduk minoritas Tionghoa ini memandang bahwa mereka adalah sama/homogen, padahal mereka yang imigrasi ini datang dari Tiongkok berasal; dari daerah-daerah yang berbeda dengan latar belakang budaya yang berbeda juga, terkait stereotype ini penulis juga mengutip kata-kata Skinner bahwa *China tetap China*
6. Penelitian yang lain, Abdullah Idi, dengan bukunya “ *Bangka ; Sejarah Sosila Tionghoa-Melayu*”, penelitian ini adalah hasil Disertasi Abdullah Idi yang kemudian dijadikan dalam bentuk buku, disini Abdullah Idi fokus pada penelitian asimilasi Tionghoa dalam masyarakat Melayu di Bangka, yang dimulai jelas pada masa maraknya eksplorasi tambang timah oleh Kesultanan Palembang. Abdullah Idi melihat bahwa semenjak era reformasi ini, dimana semangat transparansi menguat sehingga konflik (disini Abdullah Idi menggunakan istilah disharmoni) yang pada masa Orde Baru bisa di sembunyikan, di masa reformasi ini menjadi terbuka dan terlihat nyata. Abdullah Idi berpendapat bahwa di Bangka konflik tersebut sangat kecil dengan menelusuri interaksi lintas religio kultural lintas etnik, bahwa pemahaman masyarakat Tionghoa dan Melayu di Bangka sudah memiliki konstruksi menghormati perbedaan dan siap meneguhkan persamaan.

Dari enam pustaka yang peneliti kumpulkan terkait tema penelitian yaitu Resistansi China pada Masyarakat Melayu Palembang, belum ada tulisan yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian ini. Peneliti sebelumnya lebih menekankan kepada asimilasi Cina dan Melayu seperti tulisan disertasi Abdullah Idi ”*Bangka:sejarah sosial Tionghoa-Melayu*” dan skripsi Sunano “*Muslim Tionghoa di Yogyakarta*”. Tulisan yang lebih spesifik melihat asimilasi Tionghoa muslim yang ditulis Irfadhli dengan skripsi “*Asimilasi Etnis Tionghoa Muslim di Palembang*” dan tulisan gambaran umum Tionghoa di Palembang ditulis Kemas Ari “*Masyarakat Tionghoa Palembang dalam Tinjauan Sejarah*”

Namun dari beberapa karya tersebut, peneliti tidak melihat adanya tema yang mengkhususkan terhadap resistansi masyarakat Melayu Palembang terhadap keberadaan Tionghoa di Palembang. Maka berdasarkan data tersebut, masih terbuka kesempatan yang luas untuk melakukan penelitian selanjutnya yang mendalam mengenai fenomena resistansi Tionghoa oleh masyarakat Melayu Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2014), banyak sekali ragam penelitian yang dapat dilakukan, hal tersebut tergantung dari tujuannya, pendekatan, bidang ilmu , tempat dan variabelnya

a. Penelitian menurut tujuannya.

Dalam penelitian Resistensi Tionghoa ini, peneliti mencoba menggali fenomena (**Eksploratif**) yang berhubungan dengan identitas Tionghoa di Palembang terutama persepsi identitas mereka dan kedudukan mereka dalam Masyarakat Melayu di Palembang, penggalan fenomena ini dilakukan karena belum adanya penelitian mengenai identitas dan kedudukan mereka di Palembang.

b. Penelitian menurut pendekatannya

Muhajir (1996) membagi pendekatan dalam penelitian kualitatif menjadi tiga pendekatan yaitu: 1) Positivistik 2) Rasionalistik 3) Phenomenologik³⁸. Dalam penelitian Resistensi Tionghoa dalam masyarakat Melayu Palembang ini, peneliti menggunakan pendekatan Phenomenologik (fenomena). yaitu berusaha meneliti suatu kelompok kebudayaan tertentu (Tionghoa) berdasarkan pada pengamatan dan kehadiran peneliti di lapangan untuk melihat langsung keadaan dan fenomena yang terjadi dan mencoba mendokumentasikan fakta dengan sikap yang tidak memihak yang analisisnya memanfaatkan data emik (pandangan partisipan) dan data etis (pandangan peneliti) untuk tujuan praktis dan/atau advokatoris demi kepentingan kelompok itu sendiri³⁹.

³⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rake Sarasin,1996.hlm.6-23.

³⁹ John Creswell W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Untuk mengetahui proses pembentukan Resistensi Tionghoa di Palembang dan dinamikanya, maka peneliti mencoba masuk kedalam kehidupan kelompok sosial baik dari kalangan Tionghoa mapupun kalangan Melayu Palembang secara alami demi membangun empati dan sensitivitas peneliti dalam memahami segala sesuatu yang berlaku di dalamnya. Untuk itu peneliti tentunya meminta izin dan kesediaan para responden yang terlibat demi lancarnya penelitian yang dilakukan dan demi adanya keterbukaan dari komunitas mereka sehingga peneliti mendapat data yang sebenarnya dari keadaan mereka.

c. Penelitian menurut Bidang Ilmunya

Sehubungan dengan interes dan spesialisasi, maka penelitian ini menurut bidang ilmunya adalah bidang Ilmu Sosial Budaya, karena penelitian ini menggali fenomena yang terjadi di dalam masyarakat (sosial) mengeksplorasi dan mencoba memahami fenomena tersebut.

d. Penelitian menurut Tempatnya.

Penelitian berdasarnya jenis tempatnya digolongkan pada tiga kategori besar, yaitu *field research*, *library research* dan *laboratory research*. Berdasarkan tiga kriteria penelitian berdasarkan tempat tersebut, maka penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian *Field research*. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan dan mencoba mendeskripsikannya untuk kemudian mencari akar penyebab terjadinya fenomena tersebut dan mencoba mencari soluli atas permasalahan tersebut yaitu interaksi antara masyarakat Melayu Palembang dan Tionghoa.

e. Penelitian Menurut Variabelnya

Dalam disertasi ini, peneliti mengambil variable berdasarkan etnis dan agama yang dianutnya, yaitu etnis Tionghoa dan Melayu Palembang. Dengan variable waktu masa lalu dan masa sekarang, hal ini peneliti lakukan karena hendak melihat sejarah terbentuknya fenomena yang terjadi sekarang serta melihat unsur-unsur pembentuknya.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut *Lofland* dan *Lofland* (Moleong:2015) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Berkaitan hal tersebut, Moleong⁴⁰ membagi jenis data kedalam *kata kata*, *tindakan*, *sumber data tertulis*, *foto* dan *statistik*.

b. Sumber Data

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2015. hlm.157.

Sumber data adalah dari mana diperolehnya data tersebut, terbagi dua, yaitu

- 1) **Data Primer** adalah data-data yang peneliti terima dalam bentuk verbal atau kata-kata secara lisan, atau melalui gestur/gerak tubuh/ tindakan dan perilaku subjek / informan yang terkait penelitian, atau data yang diterima responden secara langsung. Disini peneliti menghubungi orang-orang yang berhubungan langsung/mengalami fenomenanya secara langsung seperti H.Harianto seorang mualaf Tionghoa yang menjadi Pembina Yayasan Masjid Haji Muhammad Ceng Ho dan Fauzi Tamrin penasehat PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Sumsel serta beberapa orang Tionghoa lainnya

- 2) **Data Sekunder**, adalah data yang berasal dari *sumber tertulis, foto dan statist* yang akan menjadi penunjang data primer. Data-data tersebut didapat melalui penelusuran pustaka, dokumentasi grafis/tabel, atau bisa juga berupa hasil notulen rapat, SMS, foto atau filem dan semua benda yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat memperkaya data primer. Data Sekunder yang terkait penelitian ini, peneliti dapat dari perpustakaan umum, koleksi dari subjek atau informan atau Peneliti melakukan pengumpulan data yang berada di organisasi-organisasi yang berhubungan dengan tema penelitian terkait seperti PITI (Persatuan Iman Tauhid Indonesia) Palembang dan PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Sumsel, baik data secara yang dihimpun organisasi maupun data yang dimiliki oleh anggotanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soewadji (2012) Data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu *angket/kuesioner, wawancara, observasi, dokumenter* dan *tes* :

a. Angket / Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan kuesioner ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian, peneliti melakukannya dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka agar informan dapat memahami maksud pertanyaan peneliti dan penggunaan pertanyaan tidak berstruktur untuk mencoba mendapat permasalahan yang ada, kemudian selanjutnya peneliti membuat kuesioner yang lebih menjuru dan terstruktur

b. Wawancara

Peneliti lakukan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi yang kompleks dan yang sebegini besar merupakan pendapat, sikap dan pengalaman pribadi dari informan. Dalam wawancara,

peneliti kadang menggunakan alat perekam Audio karena khawatir akan hilangnya informasi yang didapat.

c. *Observasi/Pengamatan*

Observasi adalah pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati langsung hal yang berkaitan dan relevan dengan data yang diperlukan⁴¹. Penelitian dilakukan adalah Observasi/pengamatan terlibat pasif, Partisipan Pasif dan tidak berstruktur, yaitu peneliti hanya mengamati kehidupan atau keseharian dari informan dalam interaksi sosialnya dengan lingkungannya. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan informan, maka peneliti melakukannya dengan tidak berstruktur untuk mendapatkan permasalahan yang dialami informan

d. *Dokumenter/ Studi Pustaka*

Teknik ini adalah mencari data dan informasi yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, laporan-laporan, jurnal ilmiah, surat kabar, penelusuran website, film dokumenter dan lainnya. Data dokumentasi ini bisa milik pribadi namun bisa juga milik suatu institusi atau organisasi yang merupakan dokumen resmi.⁴²

e. *Tes*

Pentingnya pelaksanaan tes ini adalah untuk memahami masalah pengumpulan data dalam penelitian dan mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti digunakan tes⁴³. Tapi dalam penulisan ini, peneliti tidak melakukan tes kepada narasumber.

4. Teknik Analisa Data

Analisis Data menurut Patton (Moleong:2015) adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, dengan tujuan akhirnya adalah dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴ Ada tiga model analisa data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 1) Metode Perbandingan Tetap. Oleh Glaser & Strauss dalam *Discovery of Grounded Research* 2) Metode analisa data menurut Spradley yang dikemukakannya dalam buku *Participant Observation*; dan 3) Metode analisa data Miles & Huberman seperti yang mereka kemukakan dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴² Yusuf Soewaji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2012. hlm. 160.

⁴³ Arikunto. *Prosedur Penelitian... Op. Cit.*, hlm. 266

⁴⁴ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. hlm. 287.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan Metode analisa Data *Miles & Huberman* seperti yang mereka kemukakan dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*. Didalam bukunya Secara umum proses analisis datanya mencakup : *Reduksi data, Penyajian Data/Display Data, Manipulasi Data, Kategori Data, Penarikan Kesimpulan, Interpretasi Data* dan *Pendekatan Ilmu* ⁴⁵

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan mengenai Tionghoa. reduksi data adalah proses berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data mengenai Tionghoa di Palembang, baik melalui observasi, wawancara, questioner maupun penelusuran pustaka, untuk kemudian peneliti lakukan pengolongan/mengelompokan atas data-data tersebut yang memiliki kesamaan.

Display data bermaksud melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan data yang telah kita kumpulkan. Dalam tahap ini peneliti mencoba menyajikan data-data yang sesuai dengan pokok permasalahan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).⁴⁶

Dalam **manipulasi data** ini, bermaksud untuk menjadikan data yang kita dapat menjadi lebih sederhana. Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena.

Kategorisasi data adalah memilih data-data yang sama atau membuang data-data yang tidak diperlukan, data-data yang telah dikategorikan tersebut akan diberi nama atau label, setelah diberikan label, data dilakukan sintesis atau dicari kaitan antara data-data satu dengan data-data dalam kategori yang lainnya, maka data-data yang memiliki hubungan tersebut akan dilabeli lagi.

Penarikan kesimpulan yaitu merumuskan suatu pernyataan yang proposisional, hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.

Menurut Moleong (2014), **Interpretasi Data** / penafsiran data dijabarkan dalam: *Tujuan, Prosedur, Peranan hubungan kunci, Peranan integrasi dan Analisis komparatif*. Interpretasi dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya satu peristiwa. Dalam hal ini yang berhubungan dengan upaya Tionghoa di Palembang menemukan identitas mereka dalam kehidupan sosial mereka dan resistansi masyarakat Melayu Palembang.

Interpretasi terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan pertimbangan **pendekatan ilmu**, yaitu sosiologi, antropologi, agama, ekonomi dan politik,

⁴⁵Redvia Lisa, dkk, *Rangkuman Analisa Data Kualitatif Miles & Huberman*, Jakarta: UI Press, 1992. hlm.4.

⁴⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo. 2010.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka peneliti akan menyusun pembahasan hasil penelitian ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berisikan penjelasan secara umum mengenai isi penelitian.

Bab kedua, berisi gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tinjauan historis masyarakat Tionghoa dan Melayu di Palembang, letak geografis, kondisi sosial, politik, budaya dan kondisi keagamaan masyarakat Tionghoa dan Melayu Islam di Palembang. Dalam bab ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi masyarakat Palembang secara umum dan kondisi kedudukan masyarakat Tionghoa di Kota Palembang khususnya dalam pergerakan ekonominya .

Bab ketiga, membahas napak tilas masyarakat Tionghoa di Palembang, dimulai dari tanah kelahiran mereka di Daratan Tiongkok hingga yang meliputi sejarah terbentuknya koloni Tionghoa di Palembang, karakteristik Tionghoa di Palembang dan karakteristik masyarakat Melayu Palembang. Dalam bab ini berupaya memaparkan karakter masyarakat Tionghoa dan Melayu di Palembang dalam konteks lokal yang dibentuk oleh interaksi dan komunikasi antara kelompok. Bab ini membicarakan bentuk resistensi masyarakat Melayu di Palembang terhadap Tionghoa, dimulai masa Orde Lama, Orde Baru hingga pasca Reformasi 1998.

Bab empat, membahas sebab-sebab terbentuknya perilaku resistensi terhadap Masyarakat Tionghoa di Palembang, dimulai dengan adanya perbedaan keyakinan yang dianut masyarakat Melayu Palembang (Islam) dengan masyarakat Tionghoa (Kong Hu Cu/Budha/ Kristen), kemudian sikap tersebut dibandingkan dengan Tionghoa yang sudah mentransformasikan keyakinannya ke Islam (menjadi Muslim). Perbedaan keyakinan tersebut tentu mempengaruhi kebudayaan yang berkembang di Palembang, seperti makan babi, minuman keras dan judi yang dilarang dalam ajaran Islam, kemudian dukungan pemerintah yang cenderung memihak kepada Masyarakat Tionghoa dalam gerak ekonomi di Negara ini hingga kecurigaan terhadap Nasionalisme dan gerak Politis masyarakat Tionghoa di Indonesia semuanya menjadi suatu “ramuan” yang lengkap untuk menjadi dasar argument hidupnya sikap resistensi masyarakat Melayu terhadap Tionghoa. Apalagi kemudian “ramuan” tersebut dilengkapi dengan “topping/hiasan” dengan stereotip Tionghoa yang memang sudah berkembang di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dilihat dalam perbincangan dengan beberapa tokoh masyarakat Tionghoa dan Melayu di Palembang tentang resistensi tersebut dan perbandingannya resistensi yang diterima Tionghoa non Muslim dan Tionghoa Muslim.

Bab kelima, pada bab ini, peneliti melihat arah perkembangan wacana *Chinese Studi* yang positive, ketika bagaimana para akademis berusaha mereidentifikasikan atau menteorikan ulang mengenai ke-Tionghoa-an bagi masyarakat Tionghoa baik melalui kacamata asimilasi, multikulturalisme atau hibrid. Serta melihat akomodasi kultural Melayu Palembang terhadap etnis Tionghoa serta Islam sebagai salah satu jalan asimilasi terbaik bagi Tionghoa di Palembang, yang terlihat melalui PITI (Persatuan Iman Tauhid Indonesia).

Bab keenam adalah merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan dalam penelitian ini dikaitkan kembali dengan rumusan masalah penelitian dan pembahasannya, maka kesimpulan penelitian ini menjawab faktor-faktor adanya sikap resistensi Tionghoa dalam masyarakat Melayu Palembang pasca Orde Baru serta menjawab Politik Identitas serta marginalisasi yang diterima Tionghoa di Palembang. Saran dan rekomendasi dalam penelitian ini didapat setelah mengetahui kesimpulan yang didapat peneliti, ketika penyebab suatu permasalahan dapat dilihat dengan terang dan dapat didefinisikan keberadaannya maka akan dapat disarankan opsi-opsi yang dapat dilakukan demi meminimalkan efek masalah yang terjadi.

I. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.⁴⁷ Penulisan akan dilakukan berdasarkan topik pembahasan yang telah ditentukan dengan tujuan hasil yang ditulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir.

Penulisan dilakukan dengan menyusun peristiwa sejarah berdasarkan kronologi atau peristiwa yang terjadi dan sebab akibat yang muncul. Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi. Rekonstruksi sejarah sebagaimana diungkapkan oleh Daliman⁴⁸ akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis.

Dalam penulisan ini, untuk mendapatkan gambaran kondisi naik-turunnya hubungan etnis Tionghoa dengan Masyarakat Melayu Palembang. Peneliti mencoba melihat dimulai dari runtuhnya Orde Baru tahun 1998 hingga tahun 2017, namun untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, peneliti mengumpulkan dan meneliti dimulai saat sejarah datangnya Tionghoa di Palembang pada masa Sriwijaya, Kesultanan Palembang hingga masa pasca Kemerdekaan selanjutnya kondisi mereka masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian peneliti melihat gambaran setelah kerusuhan 1998 dimana mulainya masa Reformasi, dimulai masa Presiden Habibie, Presiden Abdur Rahman Wahid (Gus Dur), Presiden Megawati, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Dalam penulisan sejarah ada langkah-langkah yang dilakukan sebelum pada penulisan, yaitu : *Pemilihan Topik* yaitu memilih topik penelitian agar sesuai dengan nilai kesejarahan, unik , fokus sehingga akan praktis dan efisien dalam pengumpulan data selanjutnya; *Heuristik* yaitu pengumpulan data sejarah terkait dengan topik penulisan yang telah kita pilih, hal ini bisa melalui studi pustaka, meneliti naskah naskah, mengunjungi tempat bersejarah atau melakukan wawancara dengan pelaku sejarah; *Verifikasi atau kritik* yaitu melakukan penilaian terhadap data-data yang dikumpulkan, menilai keasliannya dan keshahihan sumber data. *Interprestasi atau Penafsiran sejarah* yaitu menganalisis dan mencari hubungan antara data secara logis dan terakhir adalah *Histiriografi* yaitu penulisan sejarah yang tersusun dan terangkai sesuai dengan alur waktunya serta harus mampu menampilkan penulisan dari latar belakang penulisan, kronologis penulisan, nalisa-analisa

⁴⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007. hlm. 76.

⁴⁸ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012. hlm. 99.

hasil penelitian hingga dampak penelitian sehingga memberikan pemahaman baru bagi pembacanya.

Kesimpulan

Kedatangan kalangan Tionghoa di Nusantara telah terjadi sejak masa sangat lampau. Catatan pengelana Tiongkok yang datang ke Nusantara menunjukkan telah terjalin hubungan baik antara kalangan orang-orang di Nusantara dengan orang-orang dari Tiongkok. Beberapa dari mereka kemudian tinggal dan hidup bersama di Nusantara. Tercatat pada masa Kesultanan Palembang Darussalam terdapat kalangan pedagang Tionghoa yang tinggal di wilayah Palembang. Kehidupan mereka relatif damai tersebut kemudian berubah dengan kedatangan kekuasaan kolonial barat di Nusantara.

Kalangan kolonial dengan berbagai kebijakannya merubah struktur kemasyarakatan yang ada di Hindia Belanda (Nusantara). Penggunaan kalangan Tionghoa sebagai kalangan perantara serta kebijakan yang didasarkan oleh etnisitas menyebabkan renggangnya hubungan antara masyarakat asli Nusantara dengan kalangan Tionghoa. Kerengangan itulah yang kemudian berubah menjadi sikap resistansi. Sikap itu menguat ketika Belanda mensistemisasi kalangan pribumi menempati level terendah pada susunan kewarganegaraan Hindia Belanda sedangkan kalangan Tionghoa dan Eropa berturut-turut berada di level kedua dan pertama.

Ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya sikap resistansi itu tetap ada. Sikap itu ada karena masalah dwikewarganegaraan antara Indonesia dengan Tiongkok. Keberpihakan kalangan Tionghoa ketika revolusi kemerdekaan pun dipertanyakan. Di Palembang meskipun terlihat usaha para pialang dari kalangan Tionghoa yang terlihat mendukung republik, namun pada dasarnya mereka juga mendapatkan keuntungan dari hal itu. Sikap yang demikian dianggap oleh kalangan pribumi sebagai sikap setengah lagi. Belum lagi terdapat kalangan Tionghoa yang mendukung kedatangan pasukan Belanda kembali di Palembang. Kehidupan kalangan Tionghoa yang selalu berusaha untuk menetralkan diri kemudian dianggap sebagai salah satu sikap tidak mendukung perjuangan republik.

Masalah-masalah yang menerpa kalangan Tionghoa dan berakibat pada resistansi pada kalangan Tionghoa terus menerus datang. Pada masa demokrasi parlementer hingga terpimpin kalangan Tionghoa diharuskan memilih kewarganegaraan dan prosesnya berlarut-larut. Nasib buruk lainnya menimpa kalangan Tionghoa pada 1965. Mereka dituding bertanggungjawab atas pemberontakan September 1965 dan diasosiasikan dengan komunis dan PKI. Akibatnya sepanjang Orde Baru mereka ditekan oleh rezim Soeharto dengan politik asimilasinya karena menyamakan budaya Tionghoa dengan unsur komunis. Belum lagi menguatnya resistansi masyarakat akibat kebijakan tersebut. Di sisi lain, Orde Baru memberikan kesempatan penguasaan ekonomi kepada kalangan Tionghoa dan memperlebar perbedaan ekonomi antara kalangan pribumi dan Tionghoa. Hal itu dilakukan oleh Orde Baru untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional Indonesia yang akan 'mempopulerkan' kuasa Orde Baru di mata rakyat.

Resistansi hasil 'bentukan' Orde Baru terlihat ketika pecah kerusuhan pada 1998. Kalangan Tionghoa menjadi sasaran kemarahan massa dan korban penjarahan. Mereka

dituding sebagai biang keladi terjadinya krisis ekonomi dan berujung pada krisis multidimensi atas kehidupan rakyat Indonesia.

Memasuki masa reformasi, kedudukan kalangan Tionghoa berangsur-angsur membaik. Pemerintah mulai memperhatikan kebutuhan akan ruang berekspresi dan berkebudayaan masyarakat Tionghoa Indonesia. Kepercayaan mereka juga kemudian diakui oleh pemerintah. Namun semua itu belum menjadikan kalangan Tionghoa langsung diterima oleh kalangan pribumi. Masih adanya resistansi seperti penjarahan atas kalangan Tionghoa, penolakan pendirian rumah ibadah, serta masalah Ahok menunjukkan bahwa penyatuan masyarakat Tionghoa ke dalam masyarakat tidak cukup menggunakan dokumen legal formal. Diperlukan suatu sistem yang dilembagakan untuk menyatukan kalangan pribumi dan kalangan Tionghoa.

Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto memberlakukan politik asimilasi yang 'memaksa' kalangan Tionghoa membaaur dengan kalangan pribumi dan menghilangkan budaya asal. Politik itu jelas gagal dengan tetap adanya sikap resistan dalam masyarakat. Ada kalangan yang mengangkat penggunaan politik multikulturalisme. Politik itu berusaha untuk saling 'menghargai' dengan membiarkan perbedaan-perbedaan tetap ada. Pelajaran dari luar negeri menunjukkan bahwa politik multikulturalisme gagal dilaksanakan akibat makin menguatnya sentimen diantara golongan yang berbeda dan makin tidak menyatukan masyarakat. Hasil dari dialektika politik penyatuan kalangan Tionghoa adalah kebudayaan Hibrid. Dengan hibrid kalangan Tionghoa dapat disatukan dengan kalangan pribumi dengan 'merangkul' beberapa identitas yang sama namun juga tidak serta merta meninggalkan budaya lama mereka. Dalam hibriditas terdapat ruang ketiga yang menjadi titik temu diantara perbedaan yang ada. Di sinilah agensi seperti agama dapat masuk terutama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia.

Islam menjadi jembatan antara kalangan Tionghoa dan masyarakat pribumi. Agensi Islam dapat menyatukan kalangan Tionghoa karena adanya *ukhuwah Islamiyah* yang terjalin terutama bagi kalangan Tionghoa yang kemudian memeluk agama Islam. Agensi Islam menjadi benteng timbulnya resistansi kalangan pribumi dan menjadi jembatan untuk melakukan dialog.

Kalangan Tionghoa Muslim kemudian mendirikan organisasi yang menjadi 'rumah' bagi mereka dan simbol bagi jembatan dialog kalangan Tionghoa dan masyarakat pribumi. Mereka juga menjadikan organisasi itu sebagai alat pembangun identitas baru kalangan Tionghoa Muslim. Organisasi itu adalah PITI. Salah satu cabang PITI yang paling aktif gerakannya adalah PITI Sumsel.

PITI Sumsel yang aktif beraktivitas di masjid Cheng Ho Palembang merupakan induk organisasi Tionghoa Muslim Palembang. Dengan jumlah Muslim Tionghoa anggota yang relatif banyak, PITI Sumsel berusaha untuk mengurangi kesan eksklusif kalangan Tionghoa dan di sisi lain 'melestarikan' budaya Tionghoa. Organisasi itu semakin tahun anggotanya semakin banyak dan menjadi salah satu golongan yang menyatukan kalangan Muslim Tionghoa Palembang ke dalam masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya.

Wapres Yusuf Kalla pernah mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi antara orang Tionghoa dan melayu yang besar sangat berbahaya, bila di Filipina dan Thailand kesenjangan antara si kaya dan si miskin adalah orang yang beragama sama, sedangkan di Indonesia si

kaya dan si miskin berbeda agamanya, sehingga masalah kesenjangan ekonomi bisa dibawa-bawa ke arah isu SARA.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan sudut pandang sejarah dalam menguraikan sebab-sebab terjadinya resistansi atas masyarakat Tionghoa khususnya di Palembang. Sesuai dengan sifat dari Ilmu Sejarah yang diakronis, Sejarah hanya menampilkan secara keseluruhan proses dan aspek kausalitas yang menyebabkan muncul dan berkembangnya resistansi terhadap kalangan Tionghoa. Karena sifatnya yang diakronis (memanjang dalam waktu), kajian sejarah perlu untuk dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan dan teori Sosial untuk memperkaya penjelasan serta menguraikan dengan detail penyebab resistansi itu terjadi.

Mengenai resistensi didalam masyarakat Melayu Palembang terhadap suku Tionghoa dapat dikatakan sangat minimal dan tidak terlihat karena sudah banyaknya disemua sudut kehidupan sosial masyarakat Palembang yang membaaur dengan Tionghoa, dari masalah makanan hingga pernikahan antar suku. Dengan dibukanya kebebasan yang luas setelah masa Reformasi ini terhadap suku Tionghoa untuk mengekspresikan dirinya ditengah masyarakat, peneliti liat bahwa persepsi kebebasan yang diberikan tersebut belum terdefinisi dengan baku, sehingga pemahaman kebebasan tersebut seringkali bergesekan keras dengan keberadaan masyarakat Melayu. Oleh karena itu peneliti melihat pentingnya memberikan definisi kebebasan terhadap Tionghoa yang baku dan memberikan pendidikan mengenai kebangsaan dan pembauran.

Peneliti melihat bahwa setelah dibukanya kran kebebasan tersebut, pemerintah tidak menindaklanjutinya dengan kegiatan-kegiatan yang mendidik dan menanamkan pembauran dan kebangsaan yang ketat, seperti mengadakan upacara bendera, memberikan pendidikan P4 dan nilai-nilai Pancasila dimulai dari sekolah-sekolah hingga perusahaan-perusahaan swasta khususnya yang pegawainya didominasi suku Tionghoa.

Keberpihakan pemerintah dalam hal ini sangat penting, sehingga apabila terlihat keberpihakan pemerintah yang berlebihan terhadap suku Tionghoa daripada suku Melayu di Palembang, hal ini akan memicu kecemburuan, hal seperti ini akan sangat rentan ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk memicu kerusuhan, seperti adanya *statement* bahwa masyarakat Melayu harus lebih toleransi terhadap babi dan minuman keras yang dijual bebas yang kadang berdekatan dengan tempat ibadah Melayu (masjid).

Untuk meminimalkan potensi resistensi ini, masalah kesenjangan ekonomi harus diperbaiki, pemerintah harus dapat memberi akses perekonomian masyarakat melayu yang masih relatif dibawah agar dapat naik kelas dan pemerintah membuka sektor-sektor produksi agar tenaga kerja dapat terserap.